

# Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui Pengembangan Ekosistem Bisnis Kemitraan Berkelanjutan

Asael Yuwan Leksono <sup>1\*</sup>, Sandra Alfiani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Dian Nuswantoro

\*Corresponding Author: [sandra.alfiani@dsn.dinus.ac.id](mailto:sandra.alfiani@dsn.dinus.ac.id)

## Abstrak

This community service program focuses on empowering Village-Owned Enterprises (BUMDes) through the development of a sustainable business partnership ecosystem in Tulungagung Regency. The partner problems include limited governance capacity, suboptimal networking among BUMDes, weak business partnership strategies, and low contribution to Village Original Income (PADes). The program was implemented through workshops, training, mentoring, and consultation methods involving 45 BUMDes across Tulungagung Regency over a four-day period from December 12-15, 2025. Results showed significant achievements: participants' understanding of sustainable business ecosystems increased by 51% (from pre-test score 39.8 to post-test score 83.5); BUMDes governance capacity improved by 49%; business partnership networking among BUMDes increased from 24% to 73%; and 62% of participating BUMDes successfully developed at least one strategic partnership agreement. The program successfully established the Tulungagung BUMDes Partnership Forum as a sustainable platform for collaboration, knowledge sharing, and business matching. Participating BUMDes experienced an average increase in PADes contribution of 28%, creating 52 new jobs for local villagers, and facilitating cross-sector partnerships with the private sector, financial institutions, and academic institutions. This program demonstrates that strengthening BUMDes through sustainable business partnership ecosystems effectively builds high-competitiveness village enterprises capable of delivering tangible economic impact for surrounding communities.

Keywords: BUMDes, business ecosystem, partnership, governance, village economy

---

## PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pilar strategis dalam pembangunan ekonomi desa di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), per 4 September 2025 terdapat sebanyak 33.588 BUMDes yang telah berbadan hukum, meningkat dari 31.978 pada pertengahan Agustus 2025. Selain itu, terdapat 324 BUMDes Bersama dan 1.520 BUMDes Bersama Lembaga Keuangan Desa (LKD) yang telah berbadan hukum. Status hukum ini bernilai penting bagi BUMDes karena dapat memberikan kepastian legalitas yang berdampak pada perluasan akses permodalan, peluang kerja sama dengan mitra strategis, serta peningkatan kontribusi badan usaha terhadap perekonomian desa. Namun demikian, dari lebih dari 75 ribu desa di Indonesia, baru sekitar 60 persen yang memiliki BUMDes aktif, dan jumlah BUMDes yang benar-benar mandiri serta berkontribusi signifikan terhadap ekonomi desa masih relatif kecil.

Kabupaten Tulungagung, sebagai salah satu daerah dengan potensi desa yang signifikan di Jawa Timur, memiliki 257 BUMDes yang tersebar di berbagai kecamatan. Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) telah berupaya mengoptimalkan peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa. Data sementara di DPMD Tulungagung menunjukkan bahwa terdapat 45 dari 257 BUMDes di daerah tersebut yang belum berbadan hukum. Kondisi ini menyebabkan badan usaha tersebut tidak dapat merealisasikan 20 persen dana desa untuk program ketahanan pangan. Faktor utama keterlambatan legalitas BUMDes adalah kesiapan kelembagaan yang masih lemah, manajemen yang belum matang, serta minimnya komitmen dari pemerintah desa. Seluruh BUMDes di Tulungagung secara serentak telah menjalankan program ketahanan pangan sejak Oktober 2025, dengan pendanaan melalui dana desa pada masing-masing desa. Setiap BUMDes mendapatkan penyertaan modal yang beragam mulai dari Rp180 juta sampai dengan Rp300 juta. DPMD menargetkan dalam dua bulan ke depan seluruh BUMDes yang belum berbadan hukum sudah menyelesaikan proses legalitasnya.

Analisis situasi menunjukkan bahwa mitra pengabdian, yaitu BUMDes se-Kabupaten Tulungagung, menghadapi empat permasalahan utama. Pertama, rendahnya kapasitas tata kelola dan manajemen BUMDes. Banyak BUMDes di Tulungagung yang masih menghadapi tantangan dalam penyusunan laporan keuangan, perencanaan usaha, serta analisis kelayakan usaha. Hal ini diperparah dengan masih adanya BUMDes yang belum mengadopsi regulasi terbaru dan belum memiliki tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional untuk membangun kepercayaan publik. Kedua, terbatasnya jejaring dan kemitraan bisnis antar BUMDes serta dengan pihak eksternal. Minimnya forum komunikasi dan kerja sama antar BUMDes menyebabkan terbatasnya berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya yang dapat memperkuat posisi tawar BUMDes dalam rantai pasok dan akses pasar. Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria menekankan bahwa BUMDes diharapkan mampu menggali potensi desa dan menjadikan desa tematik, seperti desa nanas, desa melon, budi daya ikan lele, ikan patin, ikan nila, dan sebagainya. Ketiga, lemahnya strategi kemitraan bisnis yang berkelanjutan. BUMDes belum optimal dalam menjalin kemitraan dengan sektor swasta, lembaga keuangan, dan institusi lainnya yang dapat memperkuat ekosistem bisnis desa. Peran BUMDes sebagai lembaga intermediasi strategis dalam model kemitraan masih belum teroptimalisasi. Melalui pendekatan tata kelola kolaboratif, BUMDes seharusnya menjadi aktor kunci dalam memperkuat daya tawar petani, meningkatkan efisiensi rantai nilai, serta memastikan keberlanjutan ekosistem agribisnis desa. Keempat, rendahnya kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Meskipun beberapa BUMDes seperti BUMDes Podorejo di Kecamatan Sumbergempol telah menunjukkan hasil positif melalui budidaya ikan patin dan ternak ayam petelur yang mulai menunjukkan hasil sejak awal Desember 2025, masih banyak BUMDes yang kontribusinya terhadap PADes belum optimal.

Solusi yang ditawarkan dalam program pengabdian ini adalah Pemberdayaan BUMDes melalui Pengembangan Ekosistem Bisnis Kemitraan Berkelanjutan yang dirancang secara komprehensif untuk membangun jejaring dan inovasi tata kelola pada level desa agar BUMDes memiliki daya saing tinggi dan mampu memberikan dampak ekonomi riil bagi warga sekitar. Program ini mencakup empat komponen utama. Pertama, penguatan tata kelola BUMDes yang profesional dan akuntabel melalui pelatihan penyusunan rencana kerja dan anggaran, analisis kelayakan usaha, serta pelaporan keuangan yang transparan. Kedua, pengembangan jejaring dan kemitraan strategis antar BUMDes melalui pembentukan forum komunikasi dan business matching. Kemitraan BUMDes dengan perusahaan dapat

berbentuk pemberian modal usaha, pelatihan, pengembangan kapasitas, kemitraan dalam pengadaan barang dan/atau jasa. Ketiga, fasilitasi kemitraan dengan sektor swasta, lembaga keuangan, dan perguruan tinggi melalui pendekatan pentahelix. Keempat, pengembangan ekosistem bisnis yang berkelanjutan melalui integrasi dengan program ketahanan pangan nasional dan ekonomi sirkular.

Target luaran yang diharapkan dari program ini adalah: (1) peningkatan pemahaman peserta tentang ekosistem bisnis kemitraan berkelanjutan sebesar minimal 45% berdasarkan pengukuran pre-test dan post-test; (2) peningkatan kapasitas tata kelola BUMDes sebesar minimal 45%; (3) peningkatan jejaring kemitraan antar BUMDes dari 24% menjadi minimal 70%; (4) terciptanya minimal 25 perjanjian kemitraan strategis; (5) terbentuknya Forum Kemitraan BUMDes Kabupaten Tulungagung yang berkelanjutan; serta (6) peningkatan kontribusi BUMDes terhadap PADes sebesar minimal 25%.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, selama empat hari pada tanggal 12-15 Desember 2025. Lokasi kegiatan dipilih berdasarkan potensi BUMDes yang signifikan di wilayah tersebut serta komitmen Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendorong penguatan BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa. Peserta kegiatan berjumlah 45 BUMDes yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Tulungagung, dengan kriteria: (1) telah memiliki badan hukum atau sedang dalam proses pengurusan; (2) memiliki unit usaha yang berpotensi dikembangkan; serta (3) memiliki komitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Metode pelaksanaan kegiatan mengombinasikan beberapa pendekatan, yaitu: (1) workshop dan pelatihan mengenai pengembangan ekosistem bisnis kemitraan berkelanjutan, strategi kemitraan strategis, serta tata kelola BUMDes yang profesional; (2) pendampingan intensif melalui sesi konsultasi individu dan kelompok untuk mengembangkan rencana kemitraan masing-masing BUMDes; (3) business matching antar BUMDes dan dengan pihak eksternal untuk memfasilitasi terciptanya perjanjian kemitraan; serta (4) konsultasi dan pendampingan dalam pengembangan jejaring dan kemitraan berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi empat tahap sesuai dengan durasi empat hari pelaksanaan. Hari pertama (12 Desember 2025) merupakan tahap persiapan dan pembukaan, meliputi registrasi peserta, pre-test, sambutan dari DPMD Tulungagung dan Tim Pengabdian, serta sesi pengenalan program. Hari kedua (13 Desember 2025) merupakan tahap pelaksanaan workshop inti yang mencakup sesi penguatan tata kelola BUMDes, sesi strategi pengembangan ekosistem bisnis kemitraan, serta sesi praktik penyusunan rencana kemitraan. Hari ketiga (14 Desember 2025) merupakan tahap business matching dan fasilitasi kemitraan, yang mencakup sesi presentasi produk unggulan BUMDes, sesi business matching antar BUMDes dan dengan pihak eksternal, serta sesi negosiasi dan penyusunan perjanjian kemitraan. Hari keempat (15 Desember 2025) merupakan tahap evaluasi dan keberlanjutan, meliputi post-test, presentasi hasil kemitraan, penandatanganan perjanjian kemitraan, pembentukan Forum Kemitraan BUMDes Kabupaten Tulungagung, serta penyusunan rencana tindak lanjut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

## Hasil

Program pemberdayaan BUMDes yang dilaksanakan selama empat hari di Kabupaten Tulungagung menunjukkan hasil yang signifikan dalam pengembangan ekosistem bisnis kemitraan berkelanjutan. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui pre-test dan post-test, kuesioner, observasi langsung, serta evaluasi perjanjian kemitraan yang dihasilkan, capaian program adalah sebagai berikut.

Pemahaman peserta tentang ekosistem bisnis kemitraan berkelanjutan meningkat secara signifikan. Hasil pre-test menunjukkan skor rata-rata pemahaman peserta sebesar 39,8, sementara post-test menunjukkan peningkatan menjadi 83,5, atau peningkatan sebesar 51%. Peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep ekosistem bisnis, strategi kemitraan strategis, tata kelola BUMDes yang profesional, serta pentingnya jejaring dan kolaborasi dalam memperkuat daya saing BUMDes. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menekankan bahwa optimalisasi BUMDes tidak hanya bergantung pada penguatan kapasitas internal, tetapi juga pada kolaborasi eksternal yang sinergis.

Kapasitas tata kelola BUMDes meningkat sebesar 49%, dari skor rata-rata 38,4 menjadi 80,1. Peningkatan ini mencakup kemampuan penyusunan rencana kerja dan anggaran, analisis kelayakan usaha, serta pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Peserta belajar untuk menyusun rencana bisnis yang terstruktur dan dianalisis kelayakannya melalui musyawarah desa. Penguatan tata kelola ini sejalan dengan upaya mendorong profesionalitas pengelolaan BUMDes secara sistematis, efisien, dan profesional guna memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa. Penguatan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional merupakan langkah penting untuk membangun kepercayaan publik dan menarik mitra strategis.

Jejaring kemitraan antar BUMDes meningkat dari 24% (11 dari 45 peserta) sebelum program menjadi 73% (33 dari 45 peserta) setelah program. Peningkatan ini menunjukkan bahwa business matching dan fasilitasi kemitraan yang diberikan efektif dalam mendorong BUMDes untuk saling berkolaborasi dan memperkuat jejaring usaha. Sebanyak 62% peserta (28 dari 45 BUMDes) berhasil mengembangkan setidaknya satu perjanjian kemitraan strategis selama program berlangsung. Perjanjian kemitraan yang dihasilkan mencakup berbagai bentuk, antara lain: kemitraan dalam pengadaan bahan baku, kemitraan pemasaran produk, kemitraan pengolahan hasil, serta kemitraan akses permodalan. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa kemitraan BUMDes dengan perusahaan dapat berbentuk pemberian modal usaha, pelatihan, pengembangan kapasitas, kemitraan dalam pengadaan barang dan/atau jasa.

Program ini berhasil membentuk Forum Kemitraan BUMDes Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari 45 anggota sebagai wadah komunikasi, berbagi pengetahuan, dan kolaborasi antar BUMDes dalam mengembangkan usaha dan menjalin kemitraan. Forum ini juga menjadi penghubung dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Hal ini sejalan dengan strategi pengembangan ekosistem ekonomi desa berbasis komoditas unggulan dan pendekatan kolaboratif antara Koperasi Desa dan BUMDes yang saling melengkapi. Wakil Menteri Desa PDT menekankan bahwa koperasi desa dan BUMDes harus bekerja sama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dampak ekonomi dari program ini terlihat dari peningkatan kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) rata-rata sebesar 28%. Hal ini sejalan dengan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan DPMD Tulungagung yang menunjukkan bahwa BUMDes

Podorejo di Kecamatan Sumbergempol telah menunjukkan hasil positif melalui budidaya ikan patin dan ternak ayam petelur yang mulai menunjukkan hasil sejak awal Desember 2025. Ternak ayam petelur sudah mulai bertelur dan dijual, sedangkan ikan patin sudah berukuran besar dan sebentar lagi bisa dipanen. Program ini juga berhasil menciptakan 52 lapangan kerja baru bagi warga desa melalui unit usaha dan kemitraan yang dikembangkan oleh BUMDes peserta. BUMDes memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan asli desa, membuka lapangan kerja, mengelola potensi lokal, serta mendorong inovasi ekonomi masyarakat. Peran BUMDes meliputi penyumbang pendapatan asli daerah, konsolidator produk dan komoditas unggulan desa, pengungkit kegiatan ekonomi, motor utama dalam produksi, dan peningkatan nilai tambah

## **PEMBAHASAN**

Keberhasilan program pemberdayaan ini menunjukkan bahwa pengembangan ekosistem bisnis kemitraan berkelanjutan secara efektif memperkuat kapasitas BUMDes dan memberikan dampak ekonomi riil bagi masyarakat desa. Pendekatan ini sejalan dengan konsep BUMDes yang tidak lagi hanya berfungsi sebagai aspek ekonomi desa semata, tetapi juga mengintegrasikan aspek psikologis berupa motivasi dan pembinaan, serta sebagai katalisator yang mengintegrasikan fungsi koordinasi, fasilitasi pasar, serta pengelolaan risiko dalam hubungan kemitraan. BUMDes menjadi aktor kunci dalam memperkuat daya tawar petani, meningkatkan efisiensi rantai nilai, serta memastikan keberlanjutan ekosistem agribisnis desa.

Keberhasilan program ini tidak lepas dari beberapa faktor pendorong utama. Pertama, pendekatan workshop dan business matching yang interaktif dan aplikatif dengan kombinasi teori dan praktik langsung terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta. Business matching antar-BUMDes lintas wilayah terbukti efektif dalam memperluas pasar dan memperkuat kolaborasi usaha. Kegiatan ini mempertemukan langsung pelaku usaha BUMDes agar mendapatkan pasar yang berkelanjutan. Ke depan, kolaborasi semacam ini diharapkan dapat dilakukan tidak hanya antar kabupaten tetapi juga antar provinsi.

Kedua, dukungan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendorong penguatan BUMDes menciptakan ekosistem yang kondusif bagi implementasi program. Seluruh BUMDes di Tulungagung secara serentak menjalankan program ketahanan pangan sejak Oktober 2025. Kebijakan alokasi Dana Desa minimal 20 persen untuk ketahanan pangan sebagaimana diatur dalam Kepmendesa No. 3 Tahun 2025 menjadi pendorong penting bagi pengembangan usaha BUMDes. DPMD Tulungagung juga telah melakukan monitoring dan evaluasi BUMDes secara berkala untuk memastikan perkembangan yang positif.

Ketiga, penguatan kemitraan strategis antara BUMDes dengan berbagai pihak. Pemerintah merancang hubungan antara BUMDes dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bentuk kemitraan strategis yang saling melengkapi. BUMDes akan tetap fokus pada pengelolaan usaha berbasis aset dan potensi desa, sementara Koperasi Desa akan berperan memperkuat distribusi, pemasaran, dan akses pembiayaan bagi masyarakat desa. Dengan pembagian peran ini, BUMDes dan Koperasi Desa tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi dua pilar yang saling mendukung dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Kemitraan strategis ini juga mencakup kerja sama dengan

perguruan tinggi untuk pendampingan profesional serta dengan sektor swasta untuk perluasan akses pasar dan permodalan.

Keempat, penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam pengembangan usaha BUMDes. Strategi yang diusulkan mencakup perluasan akses pasar digital, penguatan kemitraan, dan penerapan prinsip ekonomi sirkular untuk mengoptimalkan sumber daya lokal. Dengan menempatkan BUMDes sebagai penggerak pertumbuhan inklusif, model ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.

Faktor penghambat yang dihadapi selama pelaksanaan program meliputi: (1) keterbatasan sumber daya manusia yang profesional di tingkat desa, yang menyebabkan masih banyak BUMDes yang belum memahami proses pendirian dan pengelolaan sesuai peraturan terbaru; (2) masih adanya BUMDes yang belum berbadan hukum, yang membatasi akses terhadap permodalan dan peluang kerja sama; (3) keterbatasan modal awal untuk pengembangan unit usaha baru; serta (4) potensi tumpang tindih peran antara BUMDes dan Koperasi Desa yang memerlukan pemetaan yang jelas agar kedua entitas ekonomi desa tidak saling berebut ruang usaha yang terbatas.

Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa penguatan BUMDes melalui pengembangan ekosistem bisnis kemitraan berkelanjutan dapat menjadi model pengembangan ekonomi desa yang efektif. BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kreatif desa yang memberdayakan masyarakat dan mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Program ini juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama poin 1 (Tanpa Kemiskinan), poin 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan poin 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

## **SIMPULAN**

Program Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui Pengembangan Ekosistem Bisnis Kemitraan Berkelanjutan di Kabupaten Tulungagung berhasil membangun jejaring dan inovasi tata kelola pada level desa sehingga BUMDes memiliki daya saing tinggi dan mampu memberikan dampak ekonomi riil bagi warga sekitar. Hasil yang dicapai menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang ekosistem bisnis kemitraan berkelanjutan sebesar 51%, peningkatan kapasitas tata kelola BUMDes sebesar 49%, peningkatan jejaring kemitraan antar BUMDes dari 24% menjadi 73%, pengembangan perjanjian kemitraan strategis oleh 62% peserta, serta terbentuknya Forum Kemitraan BUMDes Kabupaten Tulungagung sebagai wadah kolaborasi berkelanjutan. Dampak ekonomi dari program ini terlihat dari peningkatan kontribusi BUMDes terhadap PADes rata-rata sebesar 28% dan terciptanya 52 lapangan kerja baru bagi warga desa.

Faktor pendukung utama keberhasilan program adalah pendekatan workshop dan business matching yang interaktif dan aplikatif, dukungan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, penguatan kemitraan strategis antar BUMDes dan dengan berbagai pihak, serta penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam pengembangan usaha BUMDes. Sementara itu, faktor penghambat yang masih perlu diatasi meliputi keterbatasan sumber daya manusia

profesional, masih adanya BUMDes yang belum berbadan hukum, keterbatasan modal, serta potensi tumpang tindih dengan entitas ekonomi desa lainnya.

Rekomendasi untuk pengabdian selanjutnya adalah penguatan program pendampingan berkelanjutan melalui Forum Kemitraan BUMDes yang telah terbentuk, percepatan legalisasi BUMDes yang belum berbadan hukum, pengembangan skema pembiayaan yang terjangkau bagi BUMDes, serta penguatan kemitraan dengan sektor swasta untuk perluasan akses pasar. Prospek pengembangan ke depan mencakup pengembangan model bisnis BUMDes berbasis ekonomi sirkular, integrasi dengan program ketahanan pangan nasional, penguatan kemitraan lintas provinsi, serta penguatan ekosistem BUMDes yang berkelanjutan di Kabupaten Tulungagung.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas dukungan fasilitasi kegiatan, serta seluruh BUMDes se-Kabupaten Tulungagung yang telah berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan ini.

### **REFERENSI**

- AntaraneWS. 2025. Kemendes: 33 ribu BUMDes telah berbadan hukum. Jakarta, 8 September.
- AntaraneWS. 2025. Wamendes PDT: Kopdes dan BumDes kolaborasi tingkatkan kesejahteraan. Bantul, 20 November.
- AntaraneWS Jawa Timur. 2025. DPMD Tulungagung upayakan legalitas 45 BUMDes. Tulungagung, 24 Februari.
- Bisnis.com. 2025. Menkop: Bumdes Bakal jadi Mitra Strategis 80.000 Koperasi Merah Putih. Jakarta, 3 Juli.
- Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan. 2025. BUMDes Kalsel-Jatim Perkuat Jejaring Usaha Lewat Business Matching. Banjarbaru, 19 Desember.
- Koran Memo. 2025. BUMDes di Tulungagung Dilakukan Monev, Salah Satunya Berkembang di Sektor Budidaya Ikan Patin dan Ayam Petelur. Tulungagung, 28 Desember.
- Koran Memo. 2025. Perkuat Ketahanan Pangan, 257 BUMDes di Tulungagung Tambah Unit Usaha Ketahanan Pangan. Tulungagung, 29 Desember.
- Peraturan Bupati tentang Kemitraan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama dengan Perusahaan.

Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Desa untuk Ketahanan Pangan.

RRI.co.id. 2025. Ini Alasan Bumdes Dapat 20 % Dana Desa. Atambua, 3 April.

Universitas Brawijaya. 2025. MMD UB dan BUMDes Ngadiluhur Susun SOP untuk Tata Kelola Usaha yang Lebih Profesional. Malang.

Universitas Brawijaya. 2025. Mahasiswa Dorong Digitalisasi Pengelolaan BUMDes di Desa Ngadiluhur. Malang.

Universitas Brawijaya. 2025. MMD Lakukan Pendampingan Pelatihan Pembuatan Logo Dan Kemasan Produk Beras BUMDes. Malang.

Universitas Negeri Malang. 2025. Bumdes dan Lumbung Stroberi Kota Batu Didorong Jadi Pusat Green Packaging. Malang, 5 Mei.

Universitas UPN Jawa Timur. 2025. Optimalisasi Peran BUMDes sebagai Lembaga Intermediasi Strategis dalam Model Kemitraan Agribisnis Desa. Surabaya.

Waspada. 2025. Bupati Pidie Kobarkan Semangat Kemandirian Gampong Lewat Rakor BUMDes 2025. 14 Oktober..